

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN PANGANDARAN

Farid Arifin¹,

¹Universitas Langlangbuana

farid.arifin@unla.ac.id

ABSTRACT

The Local Government needs to carry out economic development appropriately, to achieve this goal the local government needs to accelerate the process of improving the regional economy by considering the potential of the region. This research was conducted with the aim of identifying the economic sectors of new autonomous regions such as Pangandaran Regency. The research method used in this research is descriptive quantitative, using the Location Quotient typology class and Shift-share analysis. The results of the study found that the Location Quotient Typology Analysis shows that the leading and potential sectors in Pangandaran Regency are the wholesale and retail trade sector; the car and motorcycle repair sector, the transportation and warehousing sector, the accommodation sector and the provision of food and beverages, the real estate sector, the corporate services sector, the government administration sector, defence, and the mandatory social security and education services sector. Based on the results of the shift-share analysis, it is known that the water supply, waste management, waste and recycling sector, transport and warehousing sector, accommodation and food supply sector, real estate sector, corporate services sector, and other services sector, are sectors that are growing rapidly and have competitiveness in Pangandaran Regency.

Keywords: Shift-Share; Tipologi Klassen; Potential Sector.

ABSTRAK

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah perlu melakukan pembangunan perekonomian secara tepat, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah perlu mempercepat proses peningkatan perekonomian daerah dengan mempertimbangkan pada potensi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian daerah otonomi baru seperti Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan alat penelitian tipologi kelas *Location Quotient* dan analisis *Shift-share*. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa pada Analisis Tipologi Klassen *Location Quotient* menunjukkan bahwa sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Pangandaran adalah sektor perdagangan besar dan eceran; sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, sektor real estate, sektor jasa korporasi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, serta sektor jasa jaminan sosial dan pendidikan wajib. Berdasarkan hasil analisis *shift-share* diketahui bahwa sektor penyediaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makanan, sektor real estate, sektor jasa korporasi, dan sektor jasa lainnya, merupakan sektor yang berkembang pesat dan memiliki daya saing di Kabupaten Pangandaran.

Kata kunci: Shift-Share; Tipologi Klassen; Sektor Potensial.

Klasifikasi JEL: F15; O17; O18.

1. PENDAHULUAN

Setiap pemerintah daerah tentu saja menginginkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk daerahnya. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan ekonomi dengan strategi pembangunan yang paling efektif untuk digunakan pada pola pembangunan daerah. Menurut Ayu et al. (2019), pembangunan ekonomi lokal merupakan suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah atau pihak swasta yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal dengan masyarakat lokal. Sejalan dengan hal tersebut Armelly et al. (2021) menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan daerah, kebijakan-kebijakan utama pembangunan harus selaras dengan potensi daerah. Menurut Muljanto (2021) pembangunan daerah harus bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan wilayah.

Pada dewasa ini semua negara memiliki fokus pada pengentasan kemiskinan, yang dimana pembangunan ekonomi regional harus mengarah pada pembangunan ekonomi inklusif. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan inklusif adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip peningkatan akses terhadap berbagai kesempatan kerja yang adil, memajukan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan di seluruh lapisan masyarakat Mohanty et al. (2014). Pada prinsipnya pembangunan ekonomi inklusif khususnya pada otonomi daerah didasarkan pada tiga pilar; 1) Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi; 2) Pemerataan pembangunan; 3) memperluas akses dan kesempatan kerja (Lincoln, 2015). Dalam sebuah kondisi tersebut, sebuah wilayah yang melengkapi ketiga pilar tersebut akan memiliki lapangan kerja penuh, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan inklusivitas (Adnyani & Dantes, 2022). Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah otonomi baru juga perlu untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya melalui pembangunan ekonomi yang inklusif sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran.

Untuk Kabupaten Pangandaran ini sendiri terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2012, yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat dengan luas daerah kurang lebih sekitar 168.509 KM². Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonom baru di selatan Jawa Barat dengan bentuk Kabupaten yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2022 jumlah penduduk di kabupaten pangandaran tercatat mencapai 423.670 jiwa, nilai penduduk ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,6 persen yang hanya berjumlah 399.280 jiwa. Namun dengan penduduk sebanyak itu Kabupaten Pangandaran belum bisa mencapai angka produktif tertinggi dikarenakan angka penduduk produktif di usia 20-29 hanya berkisar 11,57 persen dari total penduduk yang ada, Sedangkan usia 40 tahun ke atas lebih mendominasi. Tingkat pendidikan di kabupaten pangandaran tergolong cukup rendah dikarenakan penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan sampai sekolah menengah atas dan yang di atasnya hanya sekitar 24,09 persen sedangkan yang hanya lulusan sekolah dasar sebesar 44,97 persen hampir separuh dari total penduduk di Kabupaten Pangandaran.

Kondisi tersebut juga menjadi permasalahan dalam Catatan Peningkatan Manusia dan berdampak buruk pada kondisi moneter di Kabupaten Pangandaran sendiri. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangandaran tahun 2013 hingga 2022 merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan keuangan di Pemerintahan Pangandaran terus meningkat apalagi pada tahun 2020 terjadi pandemi yang mematikan beberapa bidang keuangan. Namun pertumbuhan tersebut belum bisa digenjut dan masih bisa diciptakan dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran

sebesar 4,44 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,93 persen dan pembangunan paling sedikit pada tahun 2020 dengan nilai pembangunan sebesar -0,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran bisa lebih maksimal dengan menggali potensi dan mengembangkan sumber daya yang merupakan sektor basis, dimana dengan demikian diharapkan dapat menjadi penggerak terhadap sektor lainnya (Tarigan, 2005). Menurut Masloman (2018) disebutkan bahwa komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah minat terhadap tenaga kerja dan produk lokal, yang dapat meningkatkan upah lokal dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pasca pandemi yang melanda seluruh dunia, bidang moneter banyak mengalami pergeseran sehingga perlu dikaji lebih jauh potensi provinsi khususnya di Kabupaten Pangandaran.

Mengingat dengan tingginya potensi daerah Kabupaten Pangandaran yang sudah ditemukan dan diungkapkan, maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungannya dengan pembangunan ekonomi inklusif untuk Kabupaten Pangandaran. Menurut Hafied (2015), pemetaan potensi ekonomi berdasarkan sektor-sektor dasar yang ada dapat memberikan informasi penting untuk menarik investor ke pemerintah daerah. Dengan kata lain hal penting yang bisa didapatkan dari adanya investasi tersebut terdapat 1) Program pembangunan prioritas tinggi yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat; dan 2) Pemerintah dapat mengembangkan kerangka kebijakan berbeda yang lebih tepat sasaran dan dapat meminimalkan berbagai bentuk yang belum sempurna sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam memetakan sektor-sektor unggulan yang berada di wilayah otonominya. Maka dalam hal ini tujuan adanya pemetaan terhadap potensi sektor unggulan adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Maka dalam penelaahan ini inti dari pendalaman ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah susunan daerah-daerah basis dalam Pemerintahan Pangandaran; 2) Bagaimana komitmen dan keseriusan bidang moneter di Kabupaten Pangandaran; serta untuk mengetahui, 3) Bagaimana sistem yang tepat untuk menciptakan daerah penggerak Kabupaten Pangandaran dalam perputaran keuangan yang komprehensif.

2. METODE DAN DATA

Pada penelitian ini merupakan semacam pemeriksaan tersendiri yang bersifat kuantitatif, dengan cakupan pada Kabupaten Pangandaran yang mana berpusat pada kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran yang dicatat secara sistematis menggunakan metoda dengan menggunakan data PDRB. Eksplorasi data ini bersumber dari informasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, dengan periode pengumpulan informasi data mulai tahun 2013 hingga 2022. Prosedur pengumpulan data informasi dilakukan dengan menggaris bawahi teknik Kajian Pustaka serta Dokumentasi, khususnya dengan cara disebarkan dan didokumentasikan informasi terkait. selengkapnyanya atas informasi yang diharapkan dapat membantu pemeriksaan ini. Dalam mencapai target penelitian ini perlu memanfaatkan perangkat keilmuan yang dapat diterapkan, sehingga dalam penelitian ini digunakan metodologi Tipologi Klassen dan *Shift-Share Analysis*.

Tipologi Klassen, analisis ini disebutkan dalam Syafrijal (2008) bahwa analisis ini digunakan teruntuk kepada pengembangan atas wilayah industri yang ada suatu wilayah, dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pangandaran. Selain itu Analisis Tipologi Klassen adalah analisis yang digunakan untuk perencanaan atau karakterisasi bidang perekonomian wilayah yang

dibingkai dalam empat kuadran fundamental dengan mempertimbangkan manfaat pembangunan moneter dan komitmen masing-masing bidang ekonomi dalam membentuk PDRB suatu kabupaten tertentu (Negara & Putri, 2020). Adapun pembagian sektor perekonomian yang sudah disebutkan diatas, terbagi kepada kuadran ke dalam kuadran yaitu sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang.

Kemudian penelitian ini juga dilengkapi dengan *Shift-Share Analysis* yang berguna untuk membedah perubahan tanda-tanda aktivitas perekonomian pada wilayah yang berbeda, seperti faktor kesempatan kerja ataupun faktor produksi yang berada di dua tempat wilayah yang berbeda dengan independensi yang lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu. (Huda, 2010). Adapun tujuan dilakukan analisis *Shift-Share* ini adalah untuk melihat pola perubahan dan pergeseran struktur ekonomi wilayah dengan membandingkan nilai PDRB pada wilayah analisis yang sama pada wilayah analisis dengan nilai yang sama pada wilayah referensi satu wilayah acuan. Disebutkan dalam Tarigan (2005) bahwa Analisis Shift-Share ini sendiri terdiri atas tiga instrumen utama yang digunakan dalam analisis Shift-Share, instrumen ini diantaranya adalah 1) *national share value*, 2) *differential shift*, serta 3) *proportional shift*.

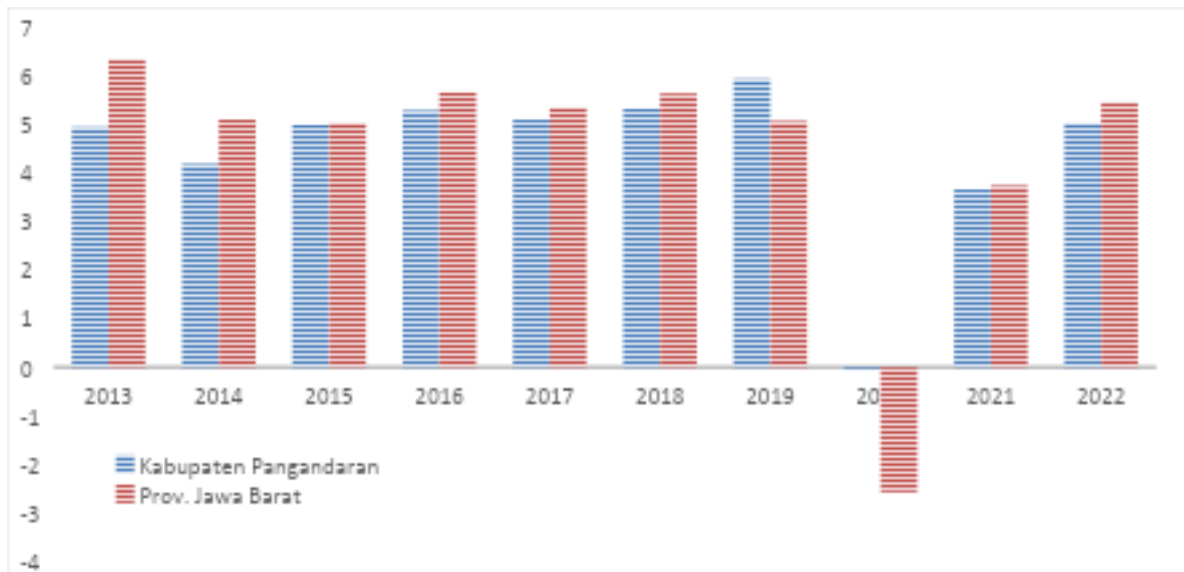
3. PEMBAHASAN

Kondisi Objektif Perekonomian

Pembangunan daerah ini pada titik tumpunya perlu untuk diarahkan kepada dihasilkannya kebijakan pemerintah tentang pembangunan dengan didasarkan pada potensi serta kearifan daerah tersebut (*endogenous development*). Kebijakan pembangunan ini dimanfaatkan untuk dimana dipergunakannya pada sumber daya manusia (SDM) potensial, instansi pemerintah, serta sumber daya alam (SDA) yang berada dalam wilayah tersebut, dimana pada penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Pangandaran. Dalam Mankiw (2014) dinyatakan bahwa arahan wilayah yang disusun perlu memberikan pedoman dalam mengambil dorongan mulai dari daerah dalam siklus kemajuan untuk membuka peluang posisi baru dan mendorong pergerakan moneter yang lebih luas. Dengan pembangunan yang berdasar pada potensi daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Pangandaran.

Adapun tujuan utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan adalah untuk meningkatkan terhadap jumlah dan jenis peluang kerja untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah tersebut, dalam hal ini Kabupaten Pangandaran dapat meningkatkan peluang jumlah dan jenis kerja pada sektor Pariwisata (Fauzi et al., 2019). Selain itu dengan pembangunan ekonomi inklusif daerah dapat meningkatkan perekonomian melalui perdagangan internasional dengan meningkatkan perdagangan produk dari wilayah tersebut (Arifin et al., 2022). Karenanya pemerintah daerah setempat Bersama dengan masyarakat perlu secara beriringan melakukan inisiasi untuk melakukan pembangunan di wilayahnya untuk menciptakan Good Governance yang mengaitkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Selain daripada itu untuk penggunaan sumber daya lokal dalam pembangunan ekonomi inklusif perlu direncanakan dan digunakan seefektif mungkin dalam tujuannya pada pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2013 sampai dengan 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (2023), dapat dihitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat

Sumber : BPS Jawa Barat dan Pangandaran, 2023

Berdasarkan pengamatan pada Gambar 1 diatas pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Pangandaran ataupun di Jawa Barat cenderung berfluktuasi, namun hal tersebut bukan suatu yang menjadi permasalahan yang besar, karena fluktuasi memang sesuatu yang di wajarkan dengan catatan bahwa ekonomi terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sebesar 5,93 persen yang bahkan bisa melebihi dari pertumbuhan ekonomi wilayah referensinya yaitu Jawa Barat, yang mana hal ini menunjukkan potensi perkembangan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru yang terus berkembang. Begitupun pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan secara bertahap dari tahun setelah 2014, namun pada tahun 2019 terjadi kelesuan karena issue global, sehingga terjadi penurunan dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Dengan mencermati pada data yang tertera dalam Gambar 1 juga kita menemukan adanya pertumbuhan ekonomi yang turun pada tahun 2020, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi yang mewabah di seluruh dunia yang tentunya berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat khususnya pangandaran dengan penurunan 0,05 persen sedangkan Jawa Barat turun sebesar 2,56 persen. Meskipun terjadi peningkatan terhadap perekonomian setelah pandemi, namun sektor ekonomi banyak yang mengalami pergeseran, oleh karenanya perlu dilihat kembali dan dianalisis sektor mana yang potensial serta pergeseran pada struktur ekonomi Kabupaten Pangandaran.

Shift-Share Analysis

Dalam penerapannya *shift share analysis* ini diperuntukan mengetahui pergantian pada ekosistem struktur perekonomian dengan tujuan menganalisis pertumbuhan serta daya saing perekonomian pada suatu daerah otonom (Malinda, 2015). Pada penelitian ini dasar perhitungan yang digunakan untuk melakukan analisis shift-share adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 berdasarkan lapangan usaha yang berada pada dua titik waktu. Maka pada penelitian ini disajikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan tahun 2010 berdasarkan lapangan usaha pada jangka waktu tahun 2013 dan tahun 2022 pada Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1. PDRB Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 dan 2022

Lapangan Usaha/Industri	Jawa Barat		Pangandaran	
	2013	2022	2013	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92,390,135	113,186,390	1,663,703	1,963,550
Pertambangan dan Penggalian	26,872,467	23,880,320	46,612	53,100
Industri Pengolahan	477,714,072	683,420,250	265,610	437,930
Pengadaan Listrik dan Gas	6,025,232	5,843,380	4,465	6,510
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	845,970	1,456,850	724	1,280
Konstruksi	87,818,637	126,184,390	518,455	712,270
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	177,747,518	230,532,560	1,284,016	1,861,280
Transportasi dan Pergudangan	47,965,849	75,521,570	553,212	938,530
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,985,298	42,972,840	433,178	785,690
Informasi dan Komunikasi	30,651,837	97,480,640	90,684	248,140
Jasa Keuangan dan Asuransi	26,347,772	38,743,110	115,235	168,190
Real Estate	12,561,546	22,993,050	158,163	308,270
Jasa Perusahaan	4,265,893	6,851,040	50,140	85,140
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,568,018	25,710,270	199,230	224,970
Jasa Pendidikan	25,715,274	46,244,590	252,269	446,800
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,720,170	13,404,190	11,124	21,140
Jasa lainnya	20,347,857	35,559,490	86,511	163,610
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1,093,543,546	1,589,984,926	5,733,329	8,426,400

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Pangandaran, 2023

Rasio PDRB Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat

Tanpa pembangunan dan analisis yang lebih mendalam, nilai PDRB tidak dapat mencerminkan kondisi kegiatan perekonomian secara akurat (Masloman, 2018). Pada umumnya tujuan dilakukan analisis shift-share adalah untuk melihat pergeseran struktur ekonomi di suatu wilayah yang dimulai dari mencari rasio perubahan atas nilai PDRB (Kamaruddin & Alam, 2019). Maka dalam penelitian ini akan dicari rasio perubahan sektor di wilayah Kabupaten Pangandaran (ri), rasio perubahan sektor di wilayah Provinsi Jawa Barat (Ri) serta rasio dari perubahan total perekonomian Provinsi Jawa Barat (Ra). Berikut adalah hasil perhitungan untuk menemukan rasio-rasio tersebut:

Tabel 2. Rasio Perubahan PDRB Provinsi Jawa Barat dan Kab. Pangandaran 2013 – 2022

Lapangan Usaha/Industry	Rasio				
	Ra	Ri	ri	(Ri-Ra)	(ri-Ri)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.45	0.23	0.18	-0.23	-0.04
Pertambangan dan Penggalian	0.45	-0.11	0.14	-0.57	0.25
Industri Pengolahan	0.45	0.43	0.65	-0.02	0.22
Pengadaan Listrik dan Gas	0.45	-0.03	0.46	-0.48	0.49
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.45	0.72	0.77	0.27	0.04
Konstruksi	0.45	0.44	0.37	-0.02	-0.06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.45	0.30	0.45	-0.16	0.15
Transportasi dan Pergudangan	0.45	0.57	0.70	0.12	0.12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.45	0.65	0.81	0.20	0.16
Informasi dan Komunikasi	0.45	2.18	1.74	1.73	-0.44
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.45	0.47	0.46	0.02	-0.01

Real Estate	0.45	0.83	0.95	0.38	0.12
Jasa Perusahaan	0.45	0.61	0.70	0.15	0.09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.45	0.09	0.13	-0.36	0.04
Jasa Pendidikan	0.45	0.80	0.77	0.34	-0.03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.45	0.99	0.90	0.54	-0.09
Jasa lainnya	0.45	0.75	0.89	0.29	0.14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, 2023 *diolah*

Pada Tabel 2 diketahui nilai perubahan total perekonomian untuk Provinsi Jawa Barat (Ra) mulai tahun 2013 sampai dengan 2022, berdasarkan perhitungan ditunjukkan bahwa nilai rasio perubahan perekonomian secara total di Jawa Barat adalah sebesar 0,45 ataupun 45,40 persen yang berarti untuk perekonomian di Provinsi Jawa Barat telah mengalami peningkatan sebesar 45,40 persen di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2013.

Selanjutnya pada perubahan sektoral atau sektor di Jawa Barat (Ri) pada tahun pengamatan akhir yaitu 2023 dibandingkan dengan perubahan pada sektor di Jawa Barat pada tahun 2013, bahwa hampir semua sektor memiliki nilai positif yang berarti hampir disemua sektor terjadi peningkatan produksi. Namun untuk sektor pertambangan dan penggalan serta sektor pengadaan listrik dan gas terjadi penurunan produksi di Jawa Barat di tahun 2023.

Kemudian untuk rasio perubahan sektor di Kabupaten Pangandaran (ri) di tahun pengamatan terakhir yaitu tahun 2023 apabila dibandingkan dengan perubahan yang ada di Kabupaten Pangandaran semuanya bernilai positif, yang berarti untuk semua sektor di Kabupaten Pangandaran terjadi peningkatan produksi secara baik.

Analisis Komponen Pertumbuhan Kabupaten Pangandaran

Sektor perekonomian di daerah tentunya menjadi tolok ukur utama dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka perlu diperhatikan pengaruh komponen pertumbuhan perekonomian secara sektoral maupun secara utuh pada perekonomian wilayah yang berada di atasnya. Menurut (Wu & Song, 2014) komponen pertumbuhan wilayah yang dimaksud meliputi pertumbuhan nasional (*national share*) pertumbuhan pangsa wilayah (*differential shift*) dan pertumbuhan proporsional (*proportional shift*). Berikut adalah hasil perhitungan komponen pertumbuhan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 3. Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Pangandaran 2013-2022

Lapangan Usaha/Industry	PNij	PPij	PPWij	PBij
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	755279.38	-380793.65	-74638.49	-455432.14
Pertambangan dan Penggalan	21160.90	-26351.02	11677.64	-14673.38
Industri Pengolahan	120580.08	-6207.22	57947.60	51740.38
Pengadaan Listrik dan Gas	2026.84	-2161.60	2180.09	18.50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	328.89	194.25	32.39	226.64
Konstruksi	235365.63	-8865.64	-32685.09	-41550.73
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	582910.99	-201601.45	195954.69	-5646.75
Transportasi dan Pergudangan	251144.29	66668.28	67505.65	134173.93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	196652.02	86532.41	69327.45	155859.86
Informasi dan Komunikasi	41168.09	156545.27	-40256.98	116288.29

Jasa Keuangan dan Asuransi	52313.64	1898.62	-1256.90	641.72
Real Estate	71801.91	59541.39	18763.98	78305.37
Jasa Perusahaan	22762.11	7622.65	4615.67	12238.32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	90445.30	-72336.01	7630.99	-64705.02
Jasa Pendidikan	114523.99	86870.64	-6864.03	80006.61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5050.15	6014.30	-1048.76	4965.55
Jasa lainnya	39273.71	25399.91	12425.64	37825.55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, 2023 diolah

Berdasarkan Tabel 3 terdapat beberapa hasil perhitungan atas komponen-komponen pertumbuhan wilayah, maka hasil tersebut dapat dilakukan interpretasikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Nasional, dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat secara total memiliki nilai positif, yang berarti pertumbuhan ekonomi Jawa Barat memberikan dampak positif kepada sektor-sektor yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sektor ekonomi di Kabupaten Pangandaran yang mendapatkan dampak terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar Rp 755.279.380.000,- sedangkan yang mendapatkan dampak terkecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar Rp 328.890.000,-.
2. Pertumbuhan Nasional, dalam komponen ini ditunjukkan perbandingan antara setiap sektor ekonomi dengan total pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat serta dampaknya terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Terdapat beberapa sektor yang bertanda negatif atau pertumbuhannya lambat yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sektor tersebut ditingkat Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan sehingga memberikan dampak pertumbuhan yang lambat juga kepada sektor yang sama di Kabupaten Pangandaran. Sebaliknya untuk sepuluh sektor yang lain menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga sektor sama di Kabupaten Pangandaran dapat bertumbuh dengan cepat.
3. Pertumbuhan Pangsa Wilayah, adapun dalam komponen pangsa wilayah ini menunjukkan pada daya saing tiap-tiap sektor ekonomi Kabupaten Pangandaran terhadap sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. Kategorinya apabila nilai pertumbuhan pangsa wilayah lebih dari 0 atau bertanda positif maka sektor ekonomi di Kabupaten Pangandaran memiliki daya saing yang baik terhadap sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya apabila pertumbuhan pangsa wilayah kurang dari 0 atau bertanda negatif maka sektor tersebut yang berada di Kabupaten Pangandaran tidak memiliki daya saing terhadap sektor yang sama dengan Jawa Barat. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui terdapat enam sektor saja yang bertanda negatif atau tidak memiliki daya saing dengan sektor yang sama dengan Jawa Barat yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Konstruksi, Sektor Informasi dan Telekomunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Jasa Pendidikan dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain itu sektor-sektor ekonomi Kabupaten Pangandaran memiliki daya saing dengan sektor yang sama dengan yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang ditandai dengan nilai pertumbuhan yang positif.
4. Pergeseran Bersih, tujuan pada komponen ini yaitu untuk mendapatkan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan progresif di Kabupaten Pangandaran, yang artinya sektor tersebut benar-benar memiliki nilai positif dari penjumlahan komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa pasar. Dengan demikian diketahui berdasarkan hasil, hanya terdapat lima sektor saja di Kabupaten Pangandaran yang tidak memiliki pertumbuhan yang progresif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selain sektor tersebut dua belas sektor lainnya di Kabupaten Pangandaran memiliki nilai positif atau dapat dikatakan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang progresif.

Klasifikasi Sektor Perekonomian Kabupaten Pangandaran

Dalam melakukan analisis guna evaluasi struktur perekonomian khususnya di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2013 – 2022, dengan menganalisis persentase komponen Pertumbuhan Proporsional dengan komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Berikut ini adalah data perbandingannya:

Tabel 4. Perubahan Komponen Pertumbuhan Proporsional dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah 2013-2022

Lapangan Usaha/Industry	PPij (persen)	PPWij (persen)	Kuadran
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-22.89	-4.49	III
Pertambangan dan Penggalian	-56.53	25.05	IV
Industri Pengolahan	-2.34	21.82	IV
Pengadaan Listrik dan Gas	-48.42	48.83	IV
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.81	4.47	I
Konstruksi	-1.71	-6.30	III
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-15.70	15.26	IV
Transportasi dan Pergudangan	12.05	12.20	I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.98	16.00	I
Informasi dan Komunikasi	172.63	-44.39	II
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.65	-1.09	II
Real Estate	37.65	11.86	I
Jasa Perusahaan	15.20	9.21	I
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-36.31	3.83	IV
Jasa Pendidikan	34.44	-2.72	II
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.06	-9.43	II
Jasa lainnya	29.36	14.36	I

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, 2023 diolah

Berdasarkan Tabel 4, dapat diklasifikasikan bahwa sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Pangandaran ke dalam 4 kuadran yang memiliki potensi dan penjelasan berbeda-beda. Maka penjelasan kuadran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kuadran I merupakan kondisi pertumbuhan proporsional dan pertumbuhan pangsa wilayah dalam kondisi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi tersebut di Kabupaten Pangandaran memiliki pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing dengan Provinsi Jawa Barat. Adapun yang termasuk dalam kuadran I adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya.
2. Kuadran II menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kabupaten Pangandaran memiliki pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki daya saing dengan provinsi Jawa Barat, karena nilai pertumbuhan pangsa wilayahnya negatif. Pada kuadran ini terdapat beberapa

sektor ekonomi yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

3. Kuadran III dimana sektor ekonomi yang berada di Kabupaten Pangandaran pertumbuhannya lamban dan tidak memiliki daya saing atas Provinsi Jawa Barat, ataupun kondisi pertumbuhan proporsional dan pertumbuhan pangsa wilayah dalam kondisi negatif. Sektor yang termasuk kedalam kuadran ini adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor konstruksi.
4. Kuadran IV adalah kondisi dimana sektor ekonomi di Kabupaten Pangandaran bertumbuh secara lamban, tetapi daya saing wilayah untuk sektor perekonomian memiliki daya saing dengan Provinsi Jawa Barat. Adapun sektor yang tergolong dalam kuadran ini adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Analisis Tipologi Klasen

Pada hasil selanjutnya analisis tipologi klasen dalam penelitian ini diperuntukan dalam menentukan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pangandaran dengan berdasarkan pemetaan potensi sektoral. Menurut (De Fretes, 2017) pada dasarnya analisis tipologi klasen dimanfaatkan untuk menggali dan menemukan sektor unggulan pada suatu wilayah guna menentukan arah kebijakan pembangunan suatu daerah oleh pemerintahan. Dengan nilai yang digunakan menentukan pada masing-masing sektor, yang dibagi menjadi empat kuadran berdasarkan nilai dari kontribusi setiap sektor (LQ) dan rata-rata pertumbuhan pada setiap sektor (DLQ) yang berada di Kabupaten Pangandaran serta wilayah referensinya yaitu Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis tipologi klasen beserta pembagian kuadran adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Tipologi Klasen

Lapangan Usaha	LQ	DLQ	Kuadran
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.33	0.82	III
Pertambangan dan Penggalian	0.36	-9.11	IV
Industri Pengolahan	0.11	1.32	II
Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	3.15	II
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.16	0.97	IV
Konstruksi	1.10	0.85	III
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.47	1.27	I
Transportasi dan Pergudangan	2.29	1.20	I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.31	1.17	I
Informasi dan Komunikasi	0.51	0.86	IV
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.80	0.95	IV
Real Estate	2.42	1.07	I
Jasa Perusahaan	2.31	1.06	I
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.64	1.10	I
Jasa Pendidikan	1.84	1.01	I
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.30	0.92	IV
Jasa lainnya	0.83	1.09	II

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis tipologi klasen yang sudah dilakukan yang disediakan pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa untuk sektor basis yang berada di Kabupaten Pangandaran ($LQ > 1$) adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan. Selain dari sektor-sektor tersebut merupakan sektor non basis ($LQ < 1$) yang berada di Kabupaten Pangandaran.

Lebih daripada itu melalui hasil analisis tipologi klassen juga dapat diketahui sektor-sektor potensial yang berada di Kabupaten Pangandaran ($DLQ > 1$), yaitu Sektor Industri Pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa lainnya. Adapun sektor lainnya di Kabupaten Pangandaran merupakan sektor yang tidak potensial ($DLQ < 1$). Kemudian dari hasil-hasil tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I, merupakan sektor ekonomi Kabupaten Pangandaran yang merupakan sektor basis dan sektor yang potensial yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa pendidikan.
2. Kuadran II, dimana dalam kuadran ini merupakan sektor-sektor di Kabupaten Pangandaran yang potensial namun bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Pangandaran. Adapun sektor-sektor yang termasuk dalam kuadran ini adalah sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor jasa lainnya.
3. Kuadran III, dalam kuadran ini adalah sektor-sektor yang tidak memiliki potensial namun merupakan sektor basis di Kabupaten Pangandaran. Kemudian sektor-sektor yang berada dalam kuadran ini adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor konstruksi.
4. Kuadran IV, adalah kuadran yang didalam bukan sektor basis dan tidak potensial di Kabupaten Pangandaran. Terdapat beberapa sektor yang berada dalam kuadran ini diantaranya adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Penentuan Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Pangandaran sangatlah penting untuk menentukan strategi apa yang harus dibuat. Dalam kedua analisis tersebut pada kuadran I analisis Tipologi Klassen yang merupakan sektor basis dan sektor yang potensial yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan dalam analisis shift-share memiliki hasil yang agak berbeda, dimana dalam kuadran I yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan memiliki daya saing dengan Provinsi Jawa Barat. Adapun yang termasuk dalam kuadran I adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya.

Dengan berlandaskan kepada kedua analisis tersebut sektor akomodasi dan penyedia makan minum diyakini sebagai sektor yang mampu mendorong terjadinya pembangunan inklusif di Kabupaten Pangandaran. Maka penentuan strategi yang paling tepat adalah pengembangan pariwisata, hal demikian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauzi et al. (2019) dalam

penelitian tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran lebih fokus dalam pengembangan pariwisata, oleh karena sektor-sektor yang menunjang pariwisata dapat menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dan berdaya saing.

Dengan pembangunan pariwisata terbukti dapat mendorong kepada pembangunan inklusif, dimana dalam penelitiannya (Adnyani & Dantes, 2022) menyebutkan penyerapan tenaga kerja lokal yang berasal dari pembangunan pariwisata melalui pemberdayaan desa adat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. (Suartini & Suyana, 2013) juga menambahkan bahwa dengan pengembangan pariwisata dari jumlah kunjungan pariwisata secara parsial dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang mana manfaat peningkatan pariwisata adalah adanya penyerapan tenaga kerja, sumbangan pajak, maupun tergeraknya sektor perekonomian lain yang berada di kawasan wisata.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis serta pembahasan tentang penggalan sektor potensial pada daerah otonomi baru, yang mana pada penelitian ini adalah Kabupaten Pangandaran. Adapun dari pembahasan yang sudah dilakukan tersebut maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Tipologi Klassen menunjukan bahwa sektor basis dan potensial di Kabupaten Pangandaran adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor jasa pendidikan.
2. Berdasarkan hasil analisis shift share diketahui bahwa sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya, merupakan sektor yang berkembang dengan cepat dan memiliki daya saing di Kabupaten Pangandaran.
3. Strategi yang dinilai paling tepat dalam mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Pangandaran adalah Pengembangan Pariwisata, dikarenakan dengan pariwisata yang berkembang akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta penyerapan tenaga kerja melalui sektor basis dan berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., & Dantes, N. K. F. (2022). Pemberdayaan desa adat dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas *krama*. *Jurnal Widya Laksana*, 11(1), 61. <https://doi.org/10.23887/jwl.v11i1.38327>
- Arifin, F., Anwar, N., & Gunawan, D. S. (2022). Factors affecting the export value of Indonesian natural rubber commodities. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13(3), 460–471. <https://doi.org/10.35555/jmbm.v13i3.1931>
- Armelly, A., Rusdi, M., & Pasaribu, E. (2021). Analisis sektor unggulan perekonomian Indonesia: Model input-output. *SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 16(2), 119–134. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.119-134>
- Ayu, M., Clara, M., Taufiq, M., & Yuliantina, A. (2019). Analisis ekonomi daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 60–68. <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8825>
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2019). Data Statistik Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Tahun 2010-2018. Bandung.
- Badan Pusat Statistik Pangandaran. (2021). Kabupaten Pangandaran dalam Angka Tahun 2021. Pangandaran.
- De Fretes, P. N. (2017). Analisis sektor unggulan (LQ), struktur ekonomi (shift share), dan proyeksi produk domestik regional bruto Provinsi Papua 2018. *Develop*, 1(2). <https://doi.org/10.25139/dev.v1i2.384>
- Fauzi, B. S., & Ahmad, A. A. (2019). Pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran. *Al-Awqaf*, 11(1).
- Hafied H. (2015). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Kretekawa Print.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamaruddin, C. A., & Alam, S. (2019). Analisis potensi sektor unggulan dan pemetaan kemiskinan masyarakat di wilayah Mamujutara Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrare*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.26858/ja.v5i2.7886>
- Lincoln, A. (2015). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- Malinda, Y. (2015). Analisis potensi ekonomi daerah dalam pengembangan komoditi unggulan Kabupaten Agam. *Economica Journal*, 3(1), 27–41. <https://doi.org/10.22202/economica.2014.v3.i1>
- Mankiw, N. Gregory. (2014). *Principles of Economics* (Vol. 7). Jakarta: Salemba Empat.
- Masloman, I. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi serta sektor yang potensial dan bardaya saing di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1).
- Mohanty, A., Guru, S., Shashikala, S., & Beeraanavar, C. R. (2014). Rethinking inclusive development: A human rights critique of South Asia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 157, 128–136. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.016>
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis sektor unggulan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–181. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>

- Negara, A. K. K., & Putri, A. K. (2020). Analisis sektor unggulan Kecamatan Toboali dengan metode *shift share* dan *location quotient*. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 24–36. <https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.111>
- Suartini, N. N., & Suyana, U. S. (2013). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(3).
- Syafrijal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wu, X., & Qi, S. (2014). Ethnic stratification and China's economic transition: Evidence from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. *Social Science Research*, 44, 158–172. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2013.12.002>